



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HUMAIRA RETNY,
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 816232

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.028.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/54 m² di KAB / KOTA SOLOK, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
2. Tanah Seluas 243 m² di KAB / KOTA SOLOK, HASIL SENDIRI Rp. 243.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m²/36 m² di KAB / KOTA SOLOK, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 169 m²/36 m² di KAB / KOTA SOLOK, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
5. Tanah Seluas 14770 m² di KAB / KOTA SOLOK, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 174.200.000

1. MOTOR, HONDA NC11A3C A/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 8.700.000
2. MOBIL, SUZUKI KATANA SHORT 2 WD Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 25.500.000
3. MOBIL, TERIOS TX MT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 16.500.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 51.313.508

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.270.013.508



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.270.013.508

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.